

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belakangan ini, masalah lingkungan semakin meluas. Pembangunan bangsa Indonesia secara umum tidak hanya bertujuan untuk menjadikan kehidupan manusia lebih kohesif, seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. mudah diakses. Karena masyarakat belum sepenuhnya menyadari pentingnya lingkungan. masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan Untuk mendukung kesehatan, makanan, minuman dan sumber daya alam lainnya Kegiatan ini menghasilkan limbah yang dikenal sebagai limbah.

Permasalahan sampah telah menjadi masalah nasional dan menjadi isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan. Timbulan sampah tidak akan pernah berkurang atau habis bahkan akan semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan populasi manusia yang semakin meningkat dan kompleksnya kegiatan manusia. Keberadaan sampah yang semakin hari semakin besar akan sangat mengurangi ruang dan mengganggu aktivitas manusia jika tidak segera ditangani dengan baik. Buruknya sistem pengelolaan sampah sudah tentu memberikan dampak pada lingkungan mulai dari masalah kesehatan, banjir bahkan dapat berpotensi mendatangkan bencana alam.¹

¹ Sari, P. N. 2016. ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PADAT DI KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 22(5), 573–579.

Populasi yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi meningkatkan jumlah sampah. Sistem limbah manusia berkontribusi terhadap berbagai macam limbah. Untuk sampah kemasan yang sulit dibuang atau yang dapat dibuang secara alami, pengelolaan pengendaliannya menjadi semakin kompleks seiring dengan semakin kompleksnya jenis dan struktur sampah. Dengan perkembangan budaya, situasi ini memaksa pemerintah daerah untuk mengembangkan keterampilan mereka untuk pengelolaan sampah yang efisien dan efektif dengan pengetahuan yang terbatas.

Praktik pengelolaan sampah pada setiap daerah memiliki cara yang berbeda misalnya pada negara berkembang praktik pengelolaan sampah masih terbatas hal yang bersifat dasar, berbeda dengan praktik pengelolaan sampah pada negara maju di mana sudah bisa melakukan pengelolaan sampah menjadi suatu output yang bernilai produktif dan barang yang dapat dikomersialkan. Dalam negara berkembang sampah merupakan suatu benda atau bahan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh manusia sehingga dibuang. Biasanya semua sampah tersebut menjijikkan dan kotor sehingga harus dibakar atau segera dibuang.²

Terdapat persyaratan mengenai pengelolaan sampah, namun dalam tata cara pengelolaan sampah yang terpadu tidak hanya melibatkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan saja, tetapi juga melibatkan

² Mulasari, S. A. (2013). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Dalam Mengolah Sampah Di Dusun Padukuhan Desa Sidokarto Kecamatan Godean Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Journal of Public Health)*, 6(3). <https://doi.org/10.12928/kesmas.v6i3.1055>

aktivitas pendauran ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini karena permasalahan sampah meliputi bagian hilir, proses dan hulu. Pada bagian hilir contohnya pembuangan sampah yang terus meningkat, pada bagian proses contohnya keterbatasan sumber daya manusia, dan pada bagian hulu contohnya kurang optimalnya sistem yang akan diterapkan pada proses akhir.³

Selain mencemari daratan, sampah juga banyak mencemari lautan. Pengelolaan sampah dengan berbagai teknik pengelolaan dilakukan guna mengurangi bobot sampah. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2011 salah satunya yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di mana masyarakat mempunyai kewajiban untuk membayar kontribusi pelayanan kebersihan. Sebenarnya masalah pelik ini erat kaitannya dengan budaya masyarakat juga didukung dengan lemahnya regulasi atau pengaturan pemerintah tentang pengelolaan sampah.

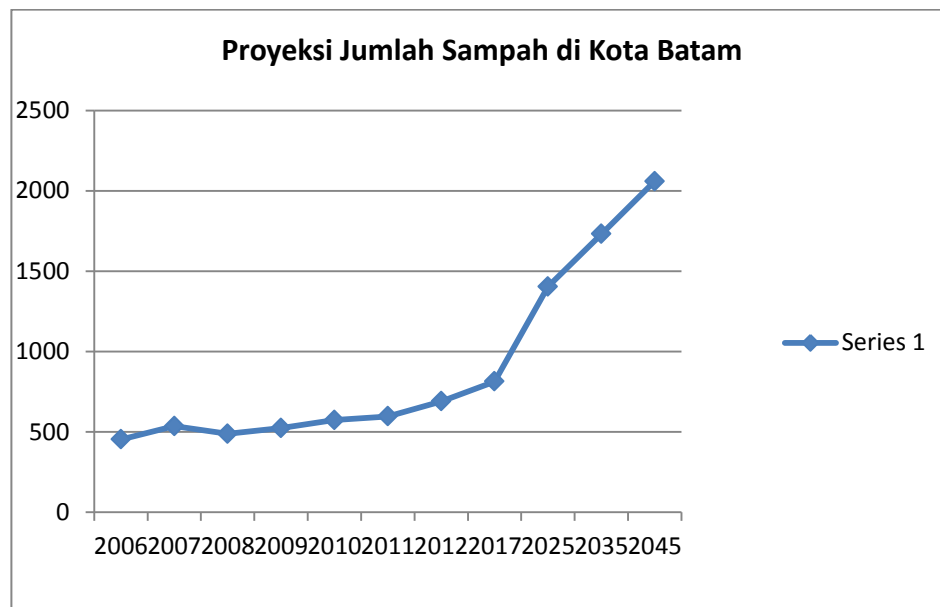
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang peraturan pelaksana *reduce*, *reuse*, dan *recycle* melalui bank sampah juga telah diterapkan mengikuti peraturan yang telah dibuat sebelumnya. Namun demikian hingga kini belum ada program yang benar-benar konsisten diaplikasikan dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan sehingga menjadi sumber masalah mulai dari sosial, kesehatan dan lingkungan.

Saat ini operasional pengelolaan sampah di kota Batam dikelola oleh masing-masing kecamatan, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013

³ Ibid, hal 209.

tentang Pengelolaan Sampah. Pemrosesan sampah dilakukan di tempat pembuangan akhir dengan menggunakan metode *controlled landfill*. Dari $\pm 1.128.610$ jiwa penduduk, total sampah yang dihasilkan setiap harinya adalah 1.153 ton, sudah pasti akan terjadi peningkatan melihat populasi penduduk juga meningkat. Sampah ini diangkut oleh petugas kebersihan dari tempat tempat pembuangan sementara tanpa adanya pemisahan antara sampah organik maupun sampah anorganik. Belum lagi sampah yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat diolah kembali sehingga memiliki nilai dan mempunyai fungsi baru dipilah oleh pemulung saat sampah sudah berakhir di TPA.⁴

Gambar 1.1
Proyeksi Jumlah Sampah di Kota Batam Berdasarkan Ton/Hari 2006-2045



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

⁴ Mulyadin, R. M., Iqbal, M., & Ariawan, K. 2018. KONFLIK PENGELOLAAN SAMPAH DI DKI JAKARTA DAN UPAYA MENGATASINYA. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 15(2), 179–191.

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan jumlah sampah ton/hari dikota Batam dari tahun 2006-2045 semakin meningkat, Jika di proyeksi jumlah sampah ton/hari tahun 2017 (813 ton/hari), 2025 (1404 ton/hari), 2035 (1.731 ton/hari), dan 2045 (2.056 ton/hari) maka semakin tahun masalah sampah akan semakin rumit dan susah untuk diselesaikan.⁵

Penyebab meningkatnya sampah yang paling besar dan berdampak adalah pola konsumsi masyarakat dan kebiasaan menganggap sampah adalah bagian kehidupan yang tidak penting sama sekali. Di sini pola pikir masyarakat harusnya diubah dengan mengikut sertakan dalam pengelolaan sampah secara langsung. Sebab penanganan masalah sampah harus dimulai dari penyebabnya yaitu masyarakat.⁶ Besarnya jumlah sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas dan tingkat konsumsi penduduk tersebut.

Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau berupaya mengurangi volume sampah hingga 40%dalam sehari melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah. Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin Hamid, mengatakan berdasarkan kajian diperkirakan rata-rata orang Indonesia menghasilkan sampah lebih kurang sebanyak 0,7 hingga 0,9 kilogram per hari. Selain melalui pilah sampah,

⁵ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLH) Kota Batam 2019

⁶ Mahnedradatta, Meta. 2022. *Fenomena Sampah Makanan, Berawal dari Pola Konsumsi Masyarakat yang Buruk*. dentitasunhas.com. diakses pada 14 Juni 2023

pemerintah kota batam juga mengajak masyarakat untuk menghasilkan rupiah melalui sampah yaitu dengan program bank sampah.⁷

Kelurahan Sungai Langkai merupakan kelurahan yang berada di kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Luas wilayah kelurahan ini adalah 6,5 km², dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 47.041 jiwa, dan kepadatan 11.516 jiwa/km².⁸

Jenis mata pencarian penduduk Kelurahan Sungai Langkai berdasarkan hasil Pemetaan Swadaya (PS) yaitu buruh, tukang kayu, pegawai swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dari beberapa jenis mata pencarian tersebut mayoritas penduduk KK miskin bermata pencarian sebagai buruh juga tenaga kerja serabutan, tingkat penghasilan yang mereka miliki rata-rata masih sangat minim sehingga belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.⁹

Terdapat faktor yang menjadi penghambat yang dapat mempengaruhi pengolahan sampah misalnya kepadatan penduduk, sosial ekonomi dan karakteristik lingkungan fisik, sikap, perilaku serta budaya yang ada di masyarakat yang kurang terkontrol.¹⁰

Tabel 1.1
Jumlah Sarana Perekonomian Menurut Jenis dan Kelurahan/Desa di Kecamatan Sagulung tahun 2019

⁷ Jessica Allifia Jaya Hidayat, "Pemkot Batam Upaya Mengurangi Volume Sampah Hingga 40 persen dalam Sehari" ANTARA KEPRI, 21 November 2023, <https://kepri.antaranews.com/berita/172332/pemkot-batam-upaya-mengurangi-volume-sampah-hingga-40-persen-dalam-sehari>

⁸ Kecamatan Sagulung Dalam Angka 2022

⁹ Profil Kelurahan Sei. Langkai <https://kelseilangkai.wordpress.com/> (Diakses pada 11 Juni 2023)

¹⁰ Sahil, J., Muhdar, M. H. I. Al, Rohman, F., & Syamsuri, I. (2016). Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah Di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate. Jurnal Bioedukasi, 4(2), 478–487.

Kelurahan/Desa	Bank	Koperasi	Minimarket/Mall Plaza/Supermarket	Toko/Warung Klontong
Tembesi	4	5	75	284
Sungai Binti	2	2	16	123
Sungai Lekop	-	1	20	135
Sagulung Kota	2	-	45	102
Sungai Langkai	-	3	12	307
Sungai Pelunggut	-	1	16	122
Jumlah	8	12	184	1073

Sumber : Kecamatan Sagulung dalam angka 2019

Berdasarkan data statistik kota Batam Kelurahan Sungai Langkai didukung dari sektor perdagangan, dilihat masyarakat setempat yang memiliki warung klontong dan juga mini market/mall plaza yang paling tinggi yaitu berjumlah 319. Ini menandakan bahwa Kelurahan Sungai langkai merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar sehingga menimbulkan penumpukan sampah yang sangat besar pula.

Seperti yang dikutip dari BatamNews pada Sabtu, 07 Oktober 2023 menyebutkan bahwa Sampah plastik dan sampah rumah tangga berhamburan di beberapa titik di sepanjang jalan-jalan Kota Batam. Sampah-sampah ini diduga dibuang secara sembarangan di malam hari oleh individu yang tidak bertanggung jawab. Pantauan *BatamNews* menemukan sampah-sampah ini tersebar di beberapa titik sepanjang jalan Diponegoro, baik ke arah Sekupang - Batu Aji maupun sebaliknya. Bahkan, sampah juga berserakan di jalan menuju Bareleng. Selain itu, di pusat kota, yaitu di pinggir jalan daerah Batam Center, juga

terdapat sampah-sampah yang berserakan. Tumpukan sampah yang dibuang secara sembarangan ini nampaknya terjadi hampir setiap hari.¹¹

Penyebab meningkatnya sampah yang paling besar dan berdampak adalah pola konsumsi masyarakat dan kebiasaan menganggap sampah adalah bagian kehidupan yang tidak penting sama sekali. Di sini pola pikir masyarakat harusnya diubah dengan mengikut sertakan dalam pengelolaan sampah secara langsung. Sebab penanganan masalah sampah harus dimulai dari penyebabnya yaitu masyarakat. Besarnya jumlah sampah yang dihasilkan dalam suatu daerah tentu sebanding dengan jumlah penduduk, jenis aktivitas dan tingkat konsumsi penduduk tersebut.¹²

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Penduduk dan Sampah Terangkut – Tidak Terangkut Per-Tahun di Kelurahan Sungai Langkai

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Sampah Terangkut/Ton	Sampah Tidak Terangkut/Ton
1	2018	183.161	30.327,966	128.212,7
2	2019	188.333	32.696,343	131.833,1
3	2020	209.386	32.130,447	146.570,2
4	2021	217.175	34.922,050	152.022,5
5	2022	226.040	35.839,290	158.228
Total			165.916.096	716.866,5

Sumber: Data dikelola Oleh Peneliti 2023

Terlihat dari jumlah sampah di Kelurahan Sungai Langkai hampir mencapai 165.916.096 kg/tahun, dengan jumlah sampah plastik 3.252.816 kg/tahun.

¹¹ Ignasius Tulus, “Sampah Menyebar di Pinggir Jalan Batam, Kesadaran Masyarakat Masih Kurang” BatamNews, 07 Oktober 2023, https://www.batamnews.co.id/berita-105309-sampah-menyebar-di-pinggir-jalanan-batam-kesadaran-masyarakat-masih-kurang.html#google_vignette

¹² Wawancara dengan kepala seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Sagulung, Kota Batam pada 12 Juni 2023

Sehingga permasalahan sampah khususnya sampah plastik di Kelurahan Sungai Langkai merupakan bagian dari permasalahan pemerintah kota Batam.

Di Batam pengelolaan sampah lebih diserahkan di masing-masing kecamatan. Namun saat ini pemerintah kota Batam sedang menggencarkan penanganan masalah sampah di kota Batam salah satunya yaitu dengan mendirikan bank sampah. Hal ini diwujudkan dengan menerbitkan sebuah kebijakan melalui Peraturan Walikota Batam Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pembentukan unit pelaksanaan teknis pelayanan kebersihan dan unit pelaksanaan teknis bank sampah pada dinas kebersihan kota Batam. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 pasal 27 berbunyi:¹³

“Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah”

Dengan demikian pemerintah daerah punya kewenangan untuk membuat kebijakan mengenai hal ini. Peraturan yang terbaru ini dibentuk lagi yakni Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, dalam peraturan ini ditekankan bahwa permasalahan sampah ditanggung jawabi oleh masing-masing kecamatan. Sehingga pemerintah menerbitkan sebuah kebijakan baru dalam menangani tingkat pencemaran lingkungan serta pengurangan sampah dengan menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat yaitu program bank sampah.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Bank sampah berdiri sesuai SK walikota tanggal 28 April 2014 dengan No. KTPS: 385/HK/XII/2017.¹⁴ Bank sampah sendiri merupakan suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Defenisi bank sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2012 adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.¹⁵

Peneliti mencantumkan penelitian terdahulu sebagai referensi agar dapat menyajikan sudut pandang baru yang belum tersentuh oleh peneliti sebelumnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Merly Mutiara Saputri, Imam Hanafi, dan Mochamad Chazienul Ulum dengan judul *“Evaluasi Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah (Studi di Bank Sampah Sumber Rejeki Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)”*. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015. Pada metode penelitiannya peneliti menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa evaluasi dampak kebijakan

¹⁴ Wawancara dengan KepalaBidang Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada 22 Juni 2023

¹⁵ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah

pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah melalui program bank sampah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dapat dilihat dari peran DKP Kota Kediri sebagai penyedia sarana dan prasarana, DKP Kota Kediri juga selalu melakukan pemantauan pada tiap kelompok Bank Sampah di Kota Kediri dan dapat dilihat pula dari partisipasi masyarakat yang ikut menjadi nasabah Bank Sampah Sumber Rejeki dan disetiap Bank Sampah yang ada disetiap Kecamatan Kota Kediri dari tahun ke tahun terus meningkat. Namun pemerintah (DKP) Kota Kediri harus terus melakukan sosialisasi serta menghimbau masyarakat agar program bank sampah di Kota Kediri dapat terus membantu dalam mengurangi volume sampah yang ada di Kota Kediri.

Kedua, penelitian yang dilakukan Risa Megariska dan Hendra Sukmana dengan judul *“Implementasi Program Pengelolaan Bank Sampah Anggrek di Desa Larangan Kecamatan Candi”*. Penelitian ini dilakukan di Desa Larangan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Pada metode penelitiannya, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diperoleh secara online maupun offline, seperti jurnal, web, dan informasi dari narasumber. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ditemukan adanya keselarasan kondisi sosial mayoritas penduduk bank sampah anggrek terutama ibu rumah tangga. Melalui program ini memberikan dampak yang baik bagi ibu rumah tangga karena dapat membantu masyarakat dalam menangani sampah rumah tangga. Sedangkan pada lingkungan ekonomi proses program bank sampah ini dapat

membantu perekonomian warga dengan menabung sampah di bank sampah. Sementara itu, mengenai lingkungan politik dalam pelaksanaan program bank sampah dalam memberikan fasilitas tidak sesuai dengan waktu yang dijanjikan sehingga pengelola tidak dapat segera melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan proses implementasi program bank sampah dalam menangani permasalahan sampah dan mengelola sampah sedikit mengalami hambatan karena pemerintah desa dalam memberikan fasilitas ada keterlambatan. Namun dapat dinyatakan berhasil dari segi lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Nunun Nurhajati dengan judul *“Implementasi Program Bank Sampah Berbasis Partisipasi Masyarakat untuk Mengurangi Penumpukan Sampah di Kabupaten Tulungagung”*. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022. Pada metode penelitiannya peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang diperoleh berupa observasi dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti bahwa implementasi dari bank sampah ini sendiri dirasa kurang maksimal terutama bila dilihat dari tingkatan input dan outputnya. Tingkatan input yang diterima oleh bank sampah terbilang sedikit karena masih sedikit masyarakat yang mau berpartisipasi dalam program ini. Berdasarkan hasil penelitian dari narasumber meskipun input yang diterima sedikit, output yang diberikan oleh program bank sampah dapat dikatakan banyak karena mampu

mengurangi sampah yang masuk ke TPA sekitar 50-75 ton perhari melalui bank sampah. Ini jauh lebih baik daripada tidak sama sekali dan tentunya semakin hari akan dikembangkan.

Dari ketiga penelitian ini apabila ditinjau sejak didirikannya bank sampah di Batam, sudah memberikan kontribusi yang positif, namun hingga saat ini masih belum dapat dirasakan optimal perannya dalam menanggulangi dan mengurangi bobot sampah di Batam. Masih bisa dilihat banyaknya sampah yang bertebaran di mana-mana, di selokan, di pasar, lahan-lahan kosong dan sebagainya. Kurangnya kesadaran masyarakat patut diacung jempol. Lingkungan di Batam sebelum adanya bank sampah ini rasanya tidak ada bedanya dengan keadaan sekarang.

Hal inilah yang menjadi acuan peneliti untuk meninjau kebijakan pengelolaan sampah melalui bank sampah. Seberapa jauh program ini berjalan dan seberapa efektif penanggulangan program ini untuk mengurangi produktivitas sampah dan hal apa saja yang menjadi kendala selama menjalankan program ini, sebab hingga sekarang pamornya tidak kelihatan dan lebih tepat dikatakan biasa-biasa saja. Sehingga peneliti mengangkat judul penelitian ini adalah **“Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan dari pengelolaan sampah di Kota Batam?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan bank sampah di Unit Bank Sampah (UBS) Allium kelurahan Sungai Langkai?

1.3 Tujuan

1. Untuk menganalisis kebijakan pengelolaan sampah di Kota Batam.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan bank sampah di Unit Bank Sampah (UBS) Allium kelurahan Sungai Langkai.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang di peroleh dari penelitian ini, berikut uraiannya antara lain :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberi manfaat bagi peneliti selanjutnya. Selain sebagai sumber informasi, penelitian ini juga bermanfaat bagi literatur yang dapat digunakan untuk mengembangkan teori yang ada dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya dalam kebijakan pemerintah terhadap pengelolaan sampah.

2. Praktis

- a. penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi dinas lingkungan hidup kota batam dan bank sampah allium kelurahan sungai langkai melalui adanya pemanfaatan bank sampah di kota batam.

- b. Sebagai suatu sarana untuk menambah wawasan terutama bagi para pembaca mengenai pentingnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan sampah sekitar.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi kebijakan dari sudut pandang teori siklikal (*cyclical theory*) maka implementasi itu akan diperlukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dari proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk lainnya, dianggap sudah usai.

Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama diantara beragam pemangku kepentingan (*stakeholders*), aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknik secara sinergistis yang digerakan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki.

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1979 dalam Solichin Abdul Wahab (2012:135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan faktor perhatian

implementasi kebijakan, yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.¹⁶

Selain definisi semacam itu, implementasi kebijakan dapat pula dianggap suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*) yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.

Sedangkan menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabater, 1983 dalam Leo Agustino (2006:139) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturalisasi atau mengatur proses implementasinya.¹⁷

Dalam mengkaji suatu kebijakan terdapat aspek yang penting, yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting

¹⁶ Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm 135

¹⁷ Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta. Hlm 139

dari keseluruhan proses kebijakan, karena studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Teori Edward III mengemukakan ada empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain:

1. Faktor Komunikasi, diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuatan kebijakan (*policy make*) yaitu merupakan orang atau kelompok yang bertugas menganalisis/merumuskan/menyusun kebijakan kepada pelaksana kebijakan (*policy implementators*) yaitu orang-orang yang bertanggung jawab di instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat.

Menurut Edward III terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu :

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- 2) Kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan.

Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- 3) Konsistensi, yaitu perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten untuk diterapkan dan dijalankan. Ini karena perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.
2. Sumber Daya, a) Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. b) Sumber daya anggaran, terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. c) Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasional implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. d) Sumber daya Informasi dan kewenangan merupakan sumber daya yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan.
 3. Disposisi atau sikap, salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

4. Struktur Birokrasi yang efisien dapat membuat implementasi kebijakan dapat berjalan efektif, karena meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi.¹⁸

Berdasarkan beberapa teori implementasi kebijakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pelaksanaan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah atau organisasi untuk mencapai tujuan. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Edward III, yaitu dilihat dari ke empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya,

¹⁸ Revy Sari ,Erwin Resmawan, dan Anwar Alaydrus, eJournal Ilmu Pemerintahan: Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Di Kota Tenggarong. Vol 6, No3, 2018, hlm 1198

disposisi, dan struktur organisasi. Dari perspektif tersebut dapat membantu peneliti untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, sehingga menjadi lebih mudah untuk diidentifikasi.

1.5.2 Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar, kegiatan di dalam pengelolaan sampah meliputi pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, transfer dan transport, pengolahan dan pembuangan akhir.¹⁹

Secara umum pengelolaan sampah di perkotaan dilakukan melalui 3 tahapan kegiatan, yaitu: pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir. Secara sederhana tahapan-tahapan dari proses kegiatan dalam pengelolaan sampah sebagai berikut:

1. Pengumpulan diartikan sebagai pengelolaan sampah dari tempat asalnya sampai ke tempat pembuangan sementara sebelum menuju tahapan berikutnya. Pada tahapan ini digunakan sarana bantuan berupa tong sampah, bak sampah, peti kemas sampah, gerobak dorong maupun tempat pembuangan sementara. Untuk melakukan pengumpulan, umumnya melibatkan sejumlah tenaga yang mengumpulkan sampah setiap periode waktu tertentu.

¹⁹ Yudhi Kartikawan, Pengelolaan Persampahan, (Yogyakarta: Jurnal Lingkungan Hidup, 200).

2. Tahapan pengangkutan dilakukan dengan menggunakan sarana bantuan berupa alat transportasi tertentu menuju ke tempat pembuangan akhir/ pengolahan. Pada tahapan ini juga melibatkan tenaga yang pada periode waktu tertentu mengangkut sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir. Pada tahap pembuangan akhir/ pengolahan, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia maupun biologis sedemikian hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Pengelolaan sampah, terutama di kawasan sekolah, dewasa ini dihadapkan kepada berbagai permasalahan yang cukup kompleks.

1.5.3 Bank Sampah

Bank Sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering yang dilakukan secara bersama-sama. Mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan memilah, mengumpulkan dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah tersebut. Semua kegiatan dalam sistem Bank Sampah dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat, bahkan Bank Sampah sendiri bisa juga memberikan manfaat ekonomi untuk masyarakat. Dalam proses pemilahan, persyaratan ini mendorong masyarakat untuk memisahkan dan mengelompokkan sampah sesuai jenis. Seperti: plastik, kertas, kaca dan metal.

Jadi, Bank Sampah akan menciptakan budaya dan menciptakan pola pikir baru agar masyarakat mau memilah sampah dalam mengurangi timbulan sampah.²⁰

Manajemen Bank Sampah secara sistem, kegiatan dari mulai sosialisasi, pelatihan, manajemen gudang, manajemen produksi, pendaftaran sebagai nasabah Bank Sampah, pencatatan dan sebagainya. Sistem Bank Sampah bukan hanya memberikan dampak positif bagi lingkungan dan memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat, namun juga menciptakan budaya bersih dan menghargai nilai yang terdapat pada sampah Non-Organik di sekitar kita.²¹

Begitu banyak sampah yang dapat di daur ulang dan diaplikasikan dalam lingkaran usaha, baik modern maupun tradisional. Berbagai jenis sampah, seperti sampah organik, mudah dan sederhana dijadikan sebagai bahan olahan. Sebagai contoh yaitu kompos dan pupuk cair, merupakan hasil nyata olahan sampah yang memiliki kontribusi besar dalam dunia pertanian. Serta biogas dan beragam olahan lain mempunyai pangsa pasar yang cukup menjanjikan di masa datang sebagai pengganti pemasok energi (supply energy).²²

Dalam pengelolaan sampah perlu dilakukan beberapa kegiatan terdapat dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yaitu:

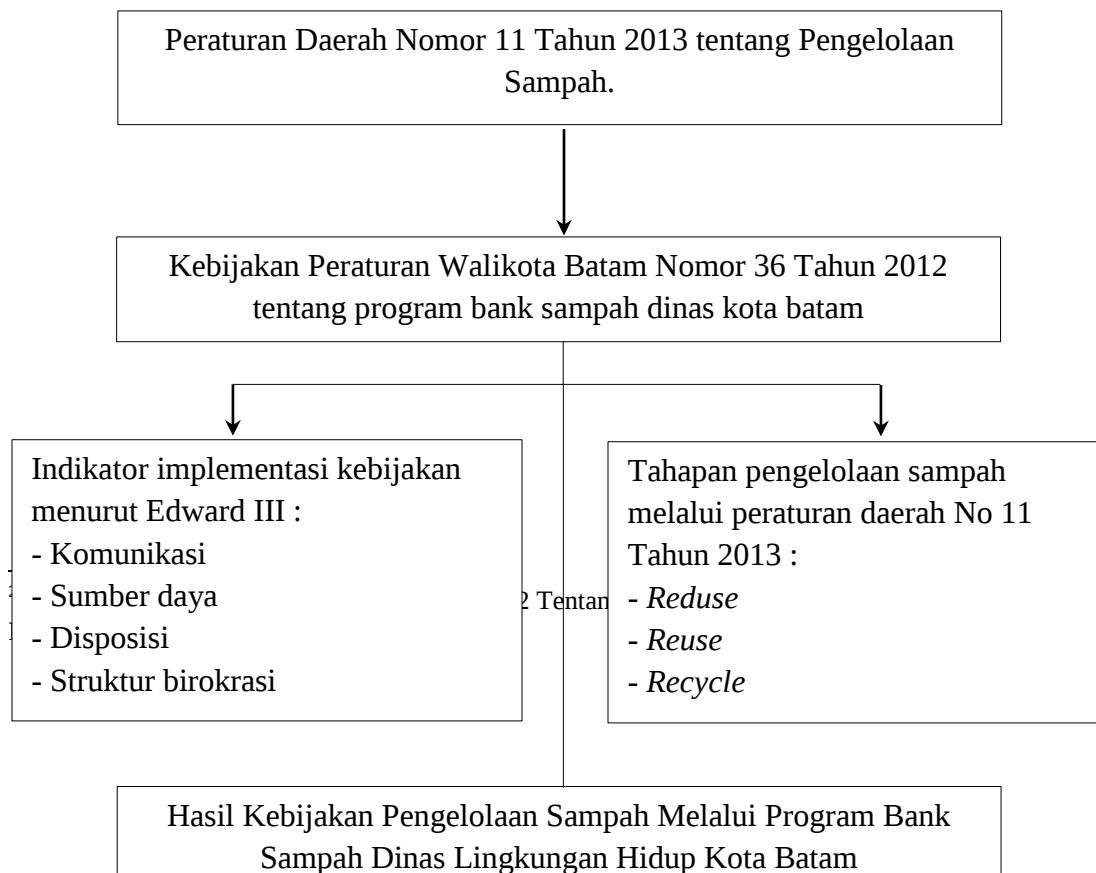
²⁰ Eka Utami, Buku Panduan “Sistem Bank Sampah” & 10 Kisah Sukses, Yayasan Unilever Indonesia, 2013, hlm 3-9

²¹ Ibid., Hlm. 3-9

²² Rudi Hartono, Penanganan dan Pengolahan Sampah, Penebar Swadaya, Jakarta, 2008, Hlm 3-5

1. *Reduse* (mengurangi), yaitu dengan mengurangi penggunaan bahan yang dapat merusak lingkungan atau mengurangi barang belanjaan seperti baju, alat-alat makeup, tissue, kertas, plastik dan sebagainya.
2. *Reuse* (memakai kembali), yaitu memilah barang yang memang masih layak dipakai kembali, seperti baju, celana diberikan bagi orang yang membutuhkan atau diberikan ke panti asuhan. Menggunakan tas belanjaan dari pada kantong plastik atau menggunakan sapu tangan dari pada tissue.
3. *Recycle* (mendaur ulang), botol plastik bekas dibuat dan dibentuk sehingga bisa dijadikan sebagai pot tanaman bunga. Walaupun tidak semua sampah dapat didaur ulang namun ada beberapa dari sampah yang dapat didaur ulang kembali atau melakukan sampah organik menjadi pupuk kompos, dan sebagainya.²³

1.6 Kerangka Berpikir



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan melakukan studi observasi, wawancara mendalam dengan tujuan untuk memperoleh gambaran mengenai manajemen organisasi pengelolaan sampah melalui bank sampah di kota Batam. Metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang akan memperoleh data deksriptif seperti kalimat-kalimat yang tertulis maupun secara lisan dari perilaku atau orang-orang yang akan diamati. Antara lain tujuan dari penelitian kualitatif ialah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang akan diteliti.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan peneliti di Kelurahan Sungai Langkai, kecamatan Sagulung Kota Batam dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang diambil oleh peneliti adalah menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui program Bank Sampah di keluraha sungai langkai berdasarkan variabel dari implementasi kebijakan serta menganalisis faktor apakah yang paling menentukan dalam pengelolaan sampah yang ada di kelurahan sungai langkai.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas berbagai sumber data yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, Jadi sumber yang secara langsung bisa didapatkan oleh peneliti, yang bisa diperoleh dari subjek dan informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti.²⁴ Adapun sumber data primer dari penelitian ini yaitu berdasarkan observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

²⁴ Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*, (Bandung: Alfabeta), Hlm 225.

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, Data yang dikumpulkan oleh peneliti ini, hanya sebagai penunjang dari data primer.²⁵ Sumber data ini bisa diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang berupa dokumen, buku, jurnal, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan informan dilakukan berdasarkan keterlibatan (keterkaitan) seseorang (informan) dengan objek penelitian yang akan diteliti. Dengan cara ini baru kemudian peneliti menentukan berapa jumlah informan yang akan dimulai informasinya berdasarkan keterlibatan dengan objek penelitian.²⁶ Teknik yang digunakan menggunakan dua metode yaitu *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tersebut berdasarkan pada sampel yang dipilih tadalah mereka yang memiliki informasi yang lebih luas atau kaya (*rich information*). Kedua *Snowball Sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang

²⁵ Sugiyono, Op.cit. Hlm. 225.

²⁶ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman., *Pedoman Penulisan Proposal Dan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.*, 2017, Hlm. 16.

awalnya jumlah sedikit kemudian menjadi membesar. Adapun informan kunci pada penelitian ini yaitu :

Tabel 1.3
Nama-Nama Informan

No	Nama Informan	Jabatan
1	Ayu Dwi Kuntari, S.K.M	Kabid Pengelolaan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
2	Sabar, S.H	Sekretaris Kelurahan Sungai Langkai
3	Heri Winarso, S.Ei	Kepala TPA Punggur, Kota Batam
4	Muhammad Taufiq	Admin UPTD TPA Punggur, Kota Batam
5	Suyetno	Pengawas Pusat Daur Ulang dan 3R
6	Budi Setyawan, S.S	Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kecamatan Sagulung
7	Dewi Mariana	Ketua Unit Bank Sampah Allium Perumahan Griya Batu Aji Asri Tahap IV Kelurahan Sungai Langkai
8	Yuktina Dwiningsih	Nasabah/Masyarakat Bank Sampah

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.²⁷ Metode ini dapat digunakan guna melihat dan mengamati secara langsung keadaan lapangan untuk penelitian agar memperoleh gambaran yang lebih luas tentang

²⁷ Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif (edisi kedua), (Yogyakarta:Erlangga, 2009), hal. 86

permasalahan yang diteliti. Adapun tujuan dari observasi atas judul yang diambil adalah untuk melihat apakah instrument dari Undang- undang dan peraturan pemerintah daerah sudah dijalankan perihal pengelolaan sampah.

2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses Tanya jawab atau sebuah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara yang merupakan sumber data atau informan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti. Wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh.²⁸

3. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Bahan dokumen terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data server dan flashdisk data tersimpan di website dan lain-lain.²⁹

1.7.7 Teknik Analisis Data

²⁸ Sugiyono, Op.cit. hlm.233

²⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2014), Hlm. 33.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kendala pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu model analisis interaktif Miles dan Huberman. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu.³⁰

1. Reduksi Data

Pengurangan data merupakan proses pengambilan, pengecilan dan penyusutan data yang diperoleh pada waktu observasi.

2. Penyajian Data

Setelah melakukan penyusutan data dengan mengambil point penting yang ada maka langkah selanjutnya adalah melakukan penyajian data, penyajian data adalah meringkus, merangkum keseluruhan point yang ada untuk dibuat laporan yang di observasi sebelumnya.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

³⁰ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, Edisi Ketiga 2005), Hlm. 171.

Analisis data pada tahap ketiga yaitu verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

1.7.8 Keabsahan Data

Mekanisme Triangulasi, yaitu kombinasi beragam sumber data, tenaga peneliti, teori dan teknik metodologis dalam suatu penelitian atau gejala sosial.³¹ Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan kelemahan sendiri. Dengan demikian triangulasi memungkinkan tangkapan realitas secara lebih valid. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti disini menggunakan Triangulasi Data, triangulasi ini menggunakan beragam sumber data dalam suatu penelitian untuk mendukung keilmiahannya penelitian ini.

³¹ Pahrudin, Makmun Wahid, Rio Yusri Maulana, Sutri Desti Elsi, Moh, Arif Rakhman.